

Manajemen Layanan Khusus pada Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah Satu Atap untuk Penguatan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Daerah Pedesaan & Terpencil

Nurul Ulfatin

Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang Email: ulfatin@yahoo.com

Abstrak: Penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia beberapa tahun yang lalu ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan yang konkrit. Satu kegiatan konkrit dan dinilai sangat efektif adalah didirikannya SMP Satu Atap di sejumlah daerah pedesaan dan daerah terpencil. SMP Satu Atap memiliki karakteristik yang sangat khusus yang berbeda dengan SMP reguler. Untuk itu, manajemen yang diterapkan di SMP Satu Atap seharusnya dirancang secara khusus. Kekhususan yang diperlukan antara lain layanan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal yang diperlukan di SMP Satu Atap adalah kurikulum atau program yang membelajarkan siswa untuk mencapai kompetensi *practical skills* dengan jenis pengalaman belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa dan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil.

Kata kunci: Manajemen layanan khusus, sekolah satu atap

Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari duaratus juta orang yang tersebar di wilayah geografis sangat luas dengan budaya yang sangat beragam. Besarnya negara merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur dengan mengikuti amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan produk hukum institusional lainnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Ada enam persoalan penting yang dihadapi dalam memberikan layanan pendidikan nasional di Indonesia, yaitu masalah ketersediaan, keterjangkauan, mutu, relevansi, kesetaraan, dan kepastian dalam perolehan layanan pendidikan. Makalah ini sengaja ditulis untuk membahas subbagian dari tema yang dibahas pada *International Conference Educational Management Administration and*

Leadership (ECEMAL) tahun 2012 di Malang yaitu penguatan manajemen pendidikan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan.

Tema makalah difokuskan pada program penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang dipilih atas dasar hasil-hasil penelitian penulis terkait dengan manajemen pendidikan meningkatkan pemerataan dan kesetaraan pendidikan. Secara spesifik, isi makalah diarahkan pada deskripsi karakteristik khusus yang bisa dianggap sebagai fenomena ketidakpastian yang ada pada pendidikan dasar di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Dengan bahasan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya kajian pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi membuat kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan pendidikan yang bermutu di pedesaan atau daerah terpencil.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah telah melaksanakan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan dalam bentuk satuan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Tulisan makalah ini sengaja dibatasi lingkupnya pada satuan pendidikan formal (sekolah) pada jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) di pedesaan dan daerah terpencil.

Untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan dasar di daerah pedesaan dan daerah terpencil, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar secara bertahap. Diawali dengan program wajib belajar pendidikan dasar enam tahun, dilanjutkan dengan program wajib belajar sembilan tahun. Bahkan sekarang mulai diwacanakan untuk dapat melaksanakan program wajib belajar duabelas tahun. Hal ini berarti pemerintah telah melakukan upaya yang terprogram dan berkelanjutan dalam menjalankan amanat undang-undang. Sebagaimana yang telah diketahui, wajib belajar untuk pendidikan dasar (tingkat SD dan SMP) atau dikenal dengan wajib belajar sembilan tahun telah lama dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV Pasal 6 Ayat 1 secara tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 11 Ayat 1 Bab yang sama juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Wajib belajar sembilan tahun yang dimaksud dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 1, yaitu bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti Warga Negara Indonesia (WNI) atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan yang dimaksud berbentuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada Pasal 2 juga dijelaskan bahwa pemerintah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap WNI untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program wajib belajar sembilan tahun sengaja dicanangkan untuk menanggulangi salah satu masalah penting di bidang pendidikan yaitu masalah pemerataan dan akses pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mengikuti pendidikan dasar, namun dalam kenyataannya tidak semua anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang layak sampai dengan sembilan tahun. Anak-anak yang hidup di pelosok pedesaan, di daerah terpencil, di pinggiran pantai, dan di daerah-daerah pegunungan dengan geografis yang sulit dijangkau, mereka banyak yang belum/tidakmendapatkan layanan/akses pendidikan dasar sampai dengan sembilan tahun. Sebagian dari mereka mungkin memang sudah mendapatkan akses layanan pendidikan, namun hanya sampai tingkat sekolah dasar, atau mereka melanjutkan pendidikan ke SMP atau yang sederajat, tetapi kemudian putus sekolah. Data menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 (JPNN.Com, 18 Juli 2011), angka putus sekolah jenjang SD secara nasional mencapai 1,5 persen dari total siswa 22,7 juta anak. Sedangkan putus sekolah SMP mencapai 1,7 persen dari total siswa 9,7 juta anak. Dikatakan lebih lanjut bahwa angka putus pada kedua tingkat sekolah itu setiap tahunnya relatif stabil. Hal ini berarti berbagai dari tahun ke tahun belum ada perubahan atau pengurangan angka putus sekolah secara signifikan.

Berdasarkan paparan di atas dapat juga dikatakan bahwa program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia belum tuntas. Di setiap daerah propinsi dan atau daerah tingkat

kabupaten, ternyata selalu terdapat kantong-kantong daerah penyumbang ketidaktuntasan wajib belajar tersebut. Bahkan, di daerah-daerah Indonesia Timur angka ketidaktuntasan semakin tinggi. Karena itu, perlu dikaji kasus pendidikan untuk program wajib belajar sembilan tahun dan manajemennya, sehingga program tersebut dapat: (1) mendorong anak usia 7-15 tahun untuk masuk sekolah sampai lulus SMP, MTs, maupun pendidikan lainnya yang sederajat; (2) meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi; (3) menurunnya angka putus sekolah (*drop out*) SD/MI sampai SMP/MTs; (4) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar; (5) meningkatkan peran, fungsi, dan kapasitas pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing; dan (6) mewujudkan komitmen internasional mengenai *Education for All* (EFA) yang dideklarasikan di Dakar tahun 2000.

Berdasarkan hasil penelitian, baik yang dilakukan oleh penulis maupun dilakukan oleh peneliti-peneliti lain (Ulfatin, 1995, Mukhadis dan Kustono, 2003; Taruh, 2008; Ulfatin dkk., 2010; dan Nirom, 2012) ditemukan dan sekaligus dapat disimpulkan bahwa penyebab utama anak-anak tidak mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun disebabkan oleh banyak faktor. Namun, dari banyak faktor itu yang terungkap paling utama adalah karena kondisi ekonomi yang rendah, sosial budaya masyarakat yang tidak mendukung, kurangnya sarana pendidikan, rendahnya kualitas dan dedikasi guru, letak geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan informasi, dan persepsi masyarakat yang kurang menganggap penting terhadap pendidikan. Hasil-hasil penelitian ini sebenarnya mendukung prediksi BPPN tahun 2001 yang mengungkap sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan pendidikan terutama di daerah terpencil.

Hambatan pendidikan di daerah terpencil yang dikemukakan oleh BPPS tahun 2001 dikemukakan Taruh (2008) sebagai berikut:

1. Secara geografis, bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki daerah-daerah terpencil, terisolasi dan sulit dijangkau.
2. Kendala demografis, juga berpengaruh terhadap upaya pendidikan yang dilakukan. Persebaran penduduk yang tidak merata, mobilitas penduduk antar pulau yang cukup tinggi, serta migrasi dan urbanisasi penduduk sulit dikendalikan dari daerah pedalaman dan pantai atau kepulauan ke kota dan pusat kegiatan industri.
3. Kompleksitas sosial dan keanekaragaman budaya suku di Indonesia, merupakan kendala lain yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan serta melaksanakan pendidikan di daerah-daerah luar kota besar dan di luar Pulau Jawa. Di daerah pedesaan dan pedalaman yang terpencil, budaya lokal dari komunitas yang bersifat homogen dan statis, masih mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

4. Kendala kelangkaan infrastruktur, merupakan salah satu dari sejumlah kendala utama yang menghambat kelancaran upaya pendidikan di daerah-daerah terpencil.
5. Kemampuan ekonomi keluarga yang rendah, juga merupakan hambatan yang pokok dalam memacu upaya pendidikan di daerah, yang jauh dari pusat pengembangan industri dan kegiatan ekonomi pasar. Orang tua dan masyarakat di pedesaan lebih memilih putra-putrinya membantu pekerjaan yang segera mendatangkan manfaat ekonomi bagi keluarga.
6. Kelangkaan guru SD dan SMP di daerah terpencil, terutama di wilayah kawasan Indonesia bagian timur sebagai akibat dari sistem rekrutmen calon guru, pengangkatan dan penempatan guru, termasuk guru wanita, dan sistem penghargaan yang belum baik bagi guru merupakan kendala yang terkait pula dengan kebijakan birokrasi pemerintah dan pengelola pendidikan swasta.
7. Kondisi keamanan dan politik yang belum stabil dan kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik diberbagai tempat lain khususnya di daerah Aceh dan Papua, serta di wilayah dimana masih terjadi konflik sosial yang bernuansa SARA seperti Ambon, Sambas, Sampit dan Poso amat merugikan bagi upaya memajukan pendidikan secara merata dan adil di semua daerah.
8. Anggaran pendidikan yang selalu terbatas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh pengelola pendidikan swasta, agama dan kelompok masyarakat lain sangat menghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang jauh dan terpencil di Indonesia.

Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Selama ini sudah ada beberapa alternatif kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mengatasi masalah wajib belajar 9 tahun, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal dilakukan antara lain dengan mendirikan sekolah (SMP) baru, melengkapi sekolah di daerah terpencil dengan berasrama, dan menyelenggarakan sekolah secara terpadu, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan nonformal dilakukan dengan mengintensifkan program Kejar Paket B, menyelenggarakan kursus keterampilan untuk pemuda desa, menyelenggarakan kelompok atau komunitas belajar, dan lain sebagainya. Beberapa alternatif juga direkomendasikan oleh peneliti, praktisi, masyarakat, bahkan ada yang sudah dilakukan sebagai kebijakan pemerintah dan masyarakat untuk memecahkan masalah pendidikan dasar sembilan tahun. Alternatif itu adalah kebijakan yang mendukung penuh terselenggaranya pendidikan yang merata, adil dan bermutu antara lain dengan menyediakan dana dan sarana yang memadai, mendirikan sekolah baru, mengangkat dan meningkatkan mutu guru. Di samping itu juga dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan, antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana, kepedulian terhadap pentingnya pendidikan anak dengan menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah berhasil meningkatkan jumlah lulusan SMP-MTs per tahun secara signifikan. Hal ini

terbukti dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) secara nasional pada tahun 2011 yang melebihi 95% (JPNN com, 18 Juli 2011). Namun demikian, capaian APK tersebut tidak selalu berkorelasi dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan setingkat lanjutan pertama. APM tingkat pendidikan lanjutan pertama (SMP) sebagian daerah masih sangat rendah atau di bawah standar yang dipersyaratkan. Dengan demikian, program wajib belajar sembilan tahun masih belum dapat dikatakan tuntas. Sebagian besar daerah yang belum dikatakan tuntas wajib belajar sembilan tahun, terutama daerah-daerah kabupaten yang jauh dari perkotaan. Kasus di Jawa Timur misalnya, menurut catatan *Mile Stones Pendidikan Jawa Timur tahun 2007* menunjukkan bahwa di setiap kabupaten terdapat kantong penyumbang putus sekolah SMP, lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP, dan buta huruf terbesar. Untuk itu, pencarian alternatif pemecahan masih perlu terus dilakukan untuk meningkatkan APM dan sekaligus mutu pendidikan dasar itu sendiri.

Seiring dengan banyaknya alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi masalah penuntasan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 telah mengintruksikan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Intruksi ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mendirikan sejumlah sekolah satu atap (SD-SMP Satu Atap) di daerah pedesaan dan daerah terpencil pada tahun 2007. Sebagai contoh di kabupaten Malang, Jawa Timur, melalui Keputusan Bupati Malang Nomor 1801/187/KEP/421.013/2007 secara serentak ditetapkan SD-SMP Satu Atap di 22 lokasi, dan pada tahun 2010 diterbitkan lagi Keputusan Bupati Malang Nomor 1801/162/KEP/421.013/2010 yang menetapkan lagi SD-SMP Satu Atap di 6 lokasi. Hal yang sama juga sudah dilakukan di beberapa daerah yang lain di Indonesia, sehingga sampai dengan tahun 2011 sudah terdapat 500 sekolah satu atap yang dibuat oleh pemerintah (JPNN, Com, 18 Juli 2011).

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh penulis dan kawan-kawan di daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur tentang “Profil Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Alternatif Penuntasannya”, menyimpulkan bahwa model pendidikan dasar yang tepat untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun di daerah pedesaan dan terpencil adalah “Pendidikan Dasar Terintegrasi Berkelanjutan Berbasis Kewirausahaan” (PD TBK). Pendidikan dasar yang ditemukan modelnya ini ternyata menggambarkan sebagian besar karakteristik sekolah satu atap yang didirikan oleh pemerintah. Perbedaannya hanya terletak pada basis kewirausahaan yang umumnya tidak/belum dimiliki oleh sekolah satu atap.

Sekolah satu atap (SD-SMP Satu Atap) merupakan sekolah (SMP) yang didirikan secara terintegrasi di gedung SD yang sudah ada. SD yang ditetapkan sebagai sekolah satu atap memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) lulusannya tidak bisa melanjutkan ke SMP karena daerahnya terpencil, jarak dari rumah siswa ke SMP reguler sangat jauh (paling dekat 5 km) yang harus ditempuh dengan berjalan kaki yang disebabkan oleh lokasi yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi, dan (2) sosial ekonomi masyarakat dan orang tua sangat rendah sehingga anak yang lulus SD terpaksa harus bekerja membantu orang tua. Dengan ditetapkannya SD menjadi SD-SMP Satu Atap, maka siswa yang lulus SD di tempat itu tidak perlu keluar atau menempuh jarak yang sangat jauh dengan berjalan kaki untuk mendapatkan pendidikan di SMP reguler. Para lulusan SD itu langsung masuk ke SMP Satu atap yang ada di tempat itu juga.

Namun demikian, karena di SD yang menampung siswa SMP umumnya belum tersedia ruang khusus untuk SMP, maka proses pembelajaran siswa SMP Satu Atap dilakukan pada siang sampai sore hari setelah pembelajaran SD usai. Hal ini yang membedakan waktu belajar di SMP Satu Atap yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan waktu belajar siswa yang ada di SMP reguler. Di SMP reguler, umumnya anak bisa belajar rata-rata selama 6–7 jam perhari atau jika SMP itu menyelenggarakan *full days school*, maka waktu belajarnya bisa sampai 8 jam perhari. Sedangkan anak yang belajar di SMP Satu Atap hanya bisa belajar di sekolah maksimal 5 jam perhari. Begitu juga dengan tidak dimilikinya gedung sendiri, jelas sarana dan prasarana belajar di SMP Satu Atap belum memadai sebagaimana di SMP reguler. Gedung dan sarana belajar untuk SMP Satu Atap dapat diistilahkan seadanya dan masih “nunut” menggunakan gedung dan sarana yang ada di SD.

Guru-guru di SMP Satu Atap juga demikian, tidak sama karakteristik kondisinya dengan guru-guru di SMP reguler. Guru-guru di SMP Satu Atap adalah sebagian besar berasal dari guru-guru yang mengajar di SD tempat SMP Satu Atap. Mereka mengajar tambahan (merangkap) di SMP Satu Atap pada siang/sore hari. Sesuai dengan kebutuhan guru, maka sebagian mencari guru baru yang diangkat secara tidak tetap. Sebagian besar guru-guru itu memiliki kompetensi bidang studi yang relatif rendah atau tidak relevan dengan bidang keahliannya. Namun, guru-guru di SMP Satu Atap umumnya memiliki semangat kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang sangat tinggi. Mereka biasa dengan sabar menjemput dan mengunjungi tempat tinggal peserta didik ketika beberapa hari peserta didik itu tidak masuk sekolah tanpa ada ijin atau keterangan. Mereka juga selalu bekerjasama dengan

perangkat dan tokoh desa untuk memberi penyuluhan akan pentingnya pendidikan bagi anak sampai dengan lulus SMP, dan masih banyak lagi kegiatan lain yang menunjukkan semangat guru untuk mensukseskan pendidikan di SMP Satu Atap.

Manajemen Layanan Khusus untuk Kurikulum SMP Satu Atap

Bertolak dari banyaknya keterbatasan yang ada di SMP Satu Atap, umumnya manajemen dilakukan dengan orientasi sebatas terselenggaranya proses pembelajaran yang terstruktur dengan waktu yang tersedia. Hal ini diakui oleh para kepala SMP Satu Atap bahwa pada tahap awal, yang dipentingkan oleh mereka adalah bisa menyelenggarakan pendidikan SMP secara terstruktur dan siswa tidak putus sekolah. Jika target awal ini sudah tercapai, maka secara berangsur-angsur manajemen dilakukan untuk mencapai target-target berikutnya yang terkait dengan pemenuhan persyaratan standar pendidikan dan peningkatan mutu layanannya.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan di SMP Satu Atap yang memenuhi standar pendidikan dan peningkatan mutu layanan, terutama dalam penuntasan wajib belajar, perlu menerapkan teori manajemen yang tepat dalam membuat keputusan terkait dengan sistem pendidikan (Campbell, dkk., 1985; Hoy dan Miskel, 2005). Hoy dan Miskel secara tegas merekomendasikan pentingnya mencari model administrasi pendidikan (sekolah) yang mempertemukan antara akademisi (ahli pendidikan), praktisi pemerintah, dan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Akademisi dapat berperan mengungkapkan fenomena, masalah, dan data kependidikan yang akurat berdasarkan hasil penyelidikannya dan merekomendasikan solusi ilmiahnya. Praktisi pemerintah menggunakan hasil penelitian akademisi untuk memilih strategi yang paling efektif dan efisien sesuai sistem pemerintahannya dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan. Sedangkan masyarakat, sebagai salah satu komponen kunci dalam kesatuan sistem pendidikan dapat terlibat langsung untuk menemukan partisipasi yang paling bermakna bagi sistem pendidikan di daerahnya.

Secara umum manajemen pendidikan yang diperlukan untuk penuntasan wajib belajar dipilah menjadi tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam keseluruhan proses manajemen pendidikan. Perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis yang terdiri atas penetapan jenis kegiatan, waktu, pelaksana, prosedur dan mekanisme kerja, kriteria keberhasilan, teknik, dan sarana

kegiatan. Dalam melaksanakan tahap perencanaan ini, pemerintah harus memandang pendidikan ke depan dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan memanfaatkan informasi dan data yang ada, pemerintah dapat menetapkan tindakan konkrit antara lain: (1) merumuskan tujuan yang akan dicapai; (2) mengumpulkan data yang berhubungan dengan tujuan rencana; (3) menganalisis dan mengklasifikasi data; (4) menjabarkan rencana secara spesifik dan operasional; (5) membuat pilihan-pilihan alternatif strategi pemecahan; (6) menyesuaikan rencana dengan situasi dan kondisi; (7) menetapkan urutan prioritas dalam merealisasikan setiap rencana; dan (8) menetapkan tindakan spesifik tentang teknik/metode, waktu, kriteria, pelaksana, dan hal-hal lain terkait dengan masalah teknis pelaksanaan kegiatan.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan. Pada tahapan ini yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dapat memerankan diri sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan semua unsur atau sumber yang terlibat dalam pelaksanaan wajib belajar, baik unsur manusia maupun nonmanusia (Doore, 1981). Unsur manusia itu antara lain kepala dinas pendidikan, kepala UPTD, camat, kepala desa, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan anggota/tokoh masyarakat. Sedangkan unsur nonmanusia antara lain sarana, prasarana, dana, dan kebijakan. Keberadaan kedua kelompok unsur ini dalam pelaksanaan satuan organisasi pendidikan (sekolah satu atap) saling berhubungan dan berinteraksi, baik dalam merealisasikan tugas pada tingkat teknis (*technical level*) yaitu pembelajaran di kelas (*classroom*) maupun pada tingkat manajerial (*managerial level*) kebijakan pendidikan di wilayahnya.

Tahapan akhir dari kegiatan manajemen adalah evaluasi. Pada tahapan ini, pemerintah dapat melakukan pengukuran dan penilaian atas hasil dan pencapaian target yang direncanakan. Penilaian yang kontinyu dan berkelanjutan sangat penting untuk ditekankan, karena selama ini evaluasi seringkali belum dianggap sebagai kesatuan kegiatan yang penting dalam manajemen oleh para praktisi di lapangan. Evaluasi terutama dilakukan untuk melihat keberhasilan substansi manajemen yang telah diterapkan di setiap satuan pendidikan, yang jika merujuk pendapat Stoops, Rafferty, dan Johnson (1981) serta Hoy dan Miskel (2005) ditekankan pada manajemen kurikulum, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, keuangan, dan layanan siswa.

Bertolak dari karakteristik khusus yang ada di SMP Satu Atap dan mengikuti rekomendasi para ahli manajemen pendidikan di atas, maka substansi manajemen yang

penting untuk dibahas lebih lanjut adalah manajemen layanan khusus. Hal ini dilandasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 Ayat 3, bahwa warga negara di daerah terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus yang perlu diterapkan di SMP Satu Atap utamanya terkait dengan manajemen kurikulum. Kurikulum di SMP Satu Atap selama ini masih menggunakan KTSP yang struktur dan jenis matapelajarannya sama dengan kurikulum yang digunakan di SMP reguler. Ketuntasan belajar sering tidak tercapai karena kurikulum tidak relevan dengan kondisi yang ada di SMP Satu Atap, apalagi ditunjang dengan kemampuan guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang kurang memadai. Untuk itu, substansi manajemen kurikulum di SMP Satu Atap perlu dikaji dan ditinjau ulang relevansinya dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat yang khas pedesaan atau daerah terpencil.

Kurikulum sebagai substansi manajemen pendidikan diistilahkan oleh Stoops, Rafferty, dan Johnson (1981) sebagai program pembelajaran (*instructional program*). Dengan mengambil contoh di Amerika Serikat, kurikulum seharusnya lebih menggambarkan karakteristik proses daripada hasil. Kurikulum sekolah tipikalnya lebih berfokus pada teknik, metodologi, material, dan fasilitas yang diperlukan dalam mencapai arah pendidikan. Banyak buku teks, petunjuk kurikulum, alat pembelajaran, yang secara komersial disiapkan oleh daerah, tetapi dalam perjalanannya gagal sebagai program inovatif untuk melengkapi upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Jika melihat karakteristik yang ada di SMP Satu Atap, maka pengembangan kurikulumnya menganut pendekatan *constructivist* yang dikemukakan oleh Hoy dan Miskel (2005) dengan mengaplikasikan premis *problem based learning*. Dari aspek psikologis, premis ini banyak diilhami dari teori Piaget (Miller, 2002), yaitu bahwa individu terfokus pada apa yang terjadi di *inner psychological life* dan bagaimana individu membangun *their cognitive or emotional structure*. Untuk melakukan hal ini, ada dua proses yang dilalui yaitu *assimilation* dan *accommodation*. *Assimilation* terkait dengan usaha memahami sesuatu yang baru dengan mengaplikasikan skema yang ada. Sedangkan *accommodation* terjadi ketika seseorang harus merubah suatu cara untuk merespon situasi yang baru. Dari aspek sosial, premis ini banyak diilhami dari teori Vygotsky (dalam Hoy dan Miskel, 2005), yang menekankan *all higher-order mental processes*, seperti pemecahan masalah yang disebabkan oleh tuntutan sosial budaya. Pandangan *constructivist* percaya bahwa siswa tidak cukup hanya diberi keterampilan dan pelatihan dasar dengan masalah yang simpel dan artifisial, tetapi

harus dihadapkan pada situasi yang kompleks dengan masalah yang “*fuzzy*”, tidak hanya yang ada di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Di sini yang ditekankan adalah interaksi sosial dan pengalaman. Asumsinya, pengalaman akan mendatangkan pengetahuan, dan interaksi sosial akan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan posisi dirinya pada posisi orang lain. Hal ini diperkuat dengan pendapat Unesco (Dikti, 2009) yang menyatakan bahwa kurikulum harus memfasilitasi munculnya “*learning to learn, learning to do, learning to be, and learning to life together*”. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan ada tiga hal yang perlu diterapkan dalam kurikulum atau program pembelajaran, yaitu (1) *broblem-based learning*, (2) *cognitive apprenticeships*, dan (3) *cooperative learning*.

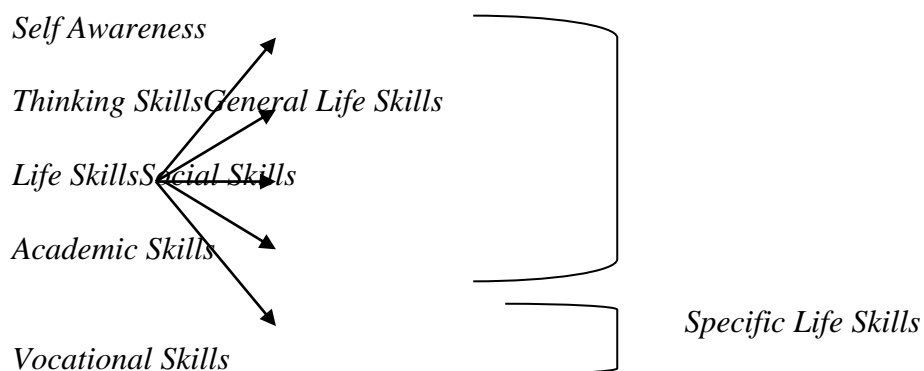
Tugas terberat yang sering disorot di SMP pedesaan adalah kurikulum yang berjarak dengan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di sekolah seringkali tidak dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata oleh anak di masyarakat pedesaan. Situasi ini turut menambah persoalan dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah. Fakta menunjukkan bahwa banyak lulusan sekolah menjadi penganggur karena keahliannya tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pada saat yang sama banyak lapangan kerja yang tidak terisi karena kurangnya tenaga sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan tidak efisiennya pengelolaan pendidikan. Dengan dasar itu, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan harus memperhatikan kebutuhan kurikulum yang dirasakan dan dibutuhkan peserta didik dan masyarakat.

Kurikulum sekolah dalam konteks ini (SMP Satu Atap) harus dipandang sebagai seperangkat sistem yang terbuka (*open system*) dan sekaligus sebagai sistem sosial (*social system*) (Campbell, dkk., 1981; Hoy dan Miskel, 2005). Aspek penting dalam memandang kurikulum sekolah sebagai sistem terbuka adalah adanya ketergantungan antara pengalaman belajar di sekolah dan lingkungannya. Sebagai sistem yang terbuka, kurikulum sekolah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar (*external*), misalnya budaya yang unik, kemampuan sosial, dan sumber belajar yang ada di masyarakat. Dalam konteks pendidikan di pedesaan juga disadari bahwa tidak ada kurikulum yang sesuai untuk semua situasi. Jika melihat struktur kurikulum yang ada pada KTSP, maka layanan khusus yang perlu dikembangkan ada pada matapelajaran muatan lokal dan pengembangan diri.

Pada SMP satu atap, kurikulum muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk

keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi kurikulum muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan pengembangan diri merupakan mata pelajaran tambahan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler (Hamalik, 2010). Substansi isi kegiatan muatan lokal lebih diarahkan pada pelatihan produktif dan fungsional sebagaimana yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini mendapat perhatian lebih karena lulusan SMP Satu Atap sebagian besar tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. Karena kondisi, mereka dituntut untuk bekerja yang langsung bisa menghasilkan uang untuk membantu ekonomi orang tua dan keluarga. Dengan memperhatikan layanan khusus pada kurikulum muatan lokal dan pengembangan pribadi, berarti dapat dikatakan bahwa substansi isi kurikulum di SMP Satu Atap setidaknya sudah memperhatikan rekomendasi dari temuan penelitian Zinser (2012) yang menyarankan bahwa untuk mengembangkan model kurikulum sebagaimana yang diharapkan di masa yang akan datang harus memberikan tekanan pada empat hal, yaitu: (1) *foundation of academics (contextual Math and Science)*, (2) *vocational skills*, (3) *technological literacy*, dan (4) *process skills (system thinking and problem solving)*. Dari keempat hal ini tampaknya *vocational skills* dan *process skills* harus menjadi tekanan dalam layanan khusus yang diterapkan di SMP satu atap.

Merujuk pendapat Kendall dan Marzano (dalam Ulfatin, 2005), *vocational skills* dan *process skills* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *life skills*. Menurut Kendall dan Marzano, *life skills* yang dimaksud dibagi menjadi lima dimensi, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri (*self awareness*), yang juga sering disebut kemampuan personal (*personal skill*); (2) kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*); (3) kecakapan sosial (*social skill*); (4) kecakapan akademik (*academic skill*); dan (5) kecakapan vokasional (*vocational skill*). Kelima dimensi itu dipilah menjadi dua kelompok, yaitu kecakapan hidup yang bersifat umum (*general life skill*), dan kecakapan hidup yang bersifat khusus (*specific life skill*). Pengelompokan itu dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pengelompokan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Jika merujuk pada pengelompokan yang tersaji pada Gambar 1, substansi kurikulum yang dimasukkan sebagai layanan khusus di SMP Satu Atap adalah kecakapan hidup yang spesifik (*specific life skills*), yaitu tepatnya kecakapan vokasional (*vocational skills*). Kecakapan ini dalam KTSP untuk SMP disebut Pra-vokasional (Depdiknas, 2006). Kecakapan pra-vokasional adalah kecakapan yang mencakup keterampilan awal yang dibutuhkan sebelum seseorang memasuki dunia kerja. Keterampilan pra-vokasional ini dapat dipelajari dan dimantapkan melalui program-program pendidikan dan atau pelatihan. Jenis dan ragam keterampilannya sangat banyak, sehingga pemilihannya sangat tergantung dengan kebutuhan vokasional yang akan dikembangkan. Misalnya, seseorang yang ingin mengembangkan vokasional di bidang pertukangan (bangunan), maka ia harus memiliki keterampilan bagaimana memotong kayu dengan benar, mencampur material bangunan, dan sebagainya.

Penutup

SMP Satu Atap sebagai bagian dari program penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di daerah pedesaan dan daerah terpencil dan menyumbang peningkatan APK dan APM pendidikan di Indonesia yang cukup signifikan. Pendirian dan pengadaan SMP Satu Atap perlu dilanjutkan dan diperbanyak, sehingga jumlah keseluruhan SMP (SMP reguler, SMP Satu Atap, dan sekolah yang sederajat) mencapai jumlah yang sebanding dengan jumlah SD. Dengan demikian, daya tampung di SMP sama dengan daya tampung di SD. Jika ini sudah bisa dijalankan, maka tuntutan penilaian penuntasan program wajib belajar sembilan tahun baru bisa dilakukan secara adil.

Begitu juga tuntutan penilaian tentang standar kualitas pendidikan baru bisa dilakukan jika prasyarat operasionalisasi SMP Satu Atap sebagai lembaga pendidikan formal sudah terpenuhi dan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

Pendidikan melalui SMP Satu Atap akan lebih berkualitas dan memiliki kesetaraan yang tinggi dengan SMP reguler jika penyelenggaraannya dikelola dengan manajemen yang sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Semua substansi manajemen di SMP Satu Atap perlu mendapatkan perhatian, terlebih substansi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius adalah kurikulum muatan lokal, karena pada muatan lokal sekolah dan stakeholders bisa secara leluasa dan proporsional memilih, merancang, dan menyediakan program paket pengalaman belajar yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat khas pedesaan atau daerah terpencil. Muatan lokal perlu dikeloka dalam bentuk program layanan khusus yang melatih peserta didik untuk mencapai kompetensi *pra-vocational skills*. Jenis keterampilan yang perlu dikembangkan dalam kurikulum muatan lokal di SMP Satu Atap perlu dicari lebih lanjut, sehingga dihasilkan jenis keterampilan sebagai bentuk layanan khusus yang betul-betul relevan dengan kebutuhan peserta didik. Pencarian kurikulum muatan lokal itu bisa dilakukan, baik melalui kajian-kajian penelitian yang melibatkan peneliti di bidang pendidikan, maupun kajian-kajian dialogis yang mempertemukan para ahli dan praktisi di lapangan secara langsung melalui seminar, workshop, dan forum-forum ilmiah lainnya.

Daftar Rujukan

- Campbell, R.F., Cunningham, L.L., Nystrand, R.O., & Usdan, M.D. 1985. *The Organization and Control of American Schools*. Fifth Ed. Columbus Ohio: Bell & Howell Company.
- Depdiknas. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur. 2008. *Mile Stone Pendidikan Propinsi Jawa Timur Tahun 2007*. Surabaya: Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur.
- Doore, R. 1981. *The Future of Formal Education in Developing Countries*. Dalam Simmons, J. & Dan Husen, T. (Ed). *The Educational Policy Issues for Developing Countries in the 1980s*. New York: Pargamon Press.
- Hamalik, O. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hoy, W.K. & Miskel, C.G. 2005. *Educational Administration. Theory, Research, and Practice*. New York: Mc Draw Hill Company.
- Intruksi Presiden R.I. No. 5 tahun 2006 tentang *Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*.
- JPNN.Com.2011. *TekanDO, Bangun SD-SMP Satu Atap*. 18 Juli 2011 Diakses 3 Feb 2012.

- Kementerian Pendidikan Nasional, 2009. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Pusat Kurikulum Kemendiknas.
- Keputusan Bupati Malang Nomor 180i.1187/KEP/421.013/2007 tentang Penetapan Lembaga SD-SMP Satu Atap.*
- Keputusan Bupati Malang Nomor 180i.162/KEP/421.013/ 2010 tentang Penetapan Lembaga SD-SMP Satu Atap.*
- Miller, D.H. 2002. *Theories of Developmental Psychology (4 th ed)*. New York: Worth.
- Mukhadis, A. & Kustono, J. 2003. *Beberapa Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Probolinggo*. Laporan Penelitian. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.
- Nirom, L.D. 2012. *Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Penuntasannya di Teluk Bintuni Papua Barat. Tesis Tidak Diterbitkan*. Malang: PPS UM Malang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Pemerataan dan Perluasan Pendidikan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.*
- Stoops, E., Rafferty, M., & Johnson, R.E. 1981. *Handbook of Educational Administration*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Taruh, E. 2008. *Pengembangan Model Pembelajaran Bagi Anak SD/MI di Daerah Terpencil*. Laporan Penelitian. Gorontalo: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.
- Ulfatin, N. 1995. *Partisipasi dan Masalah yang Dihadapi Orang Tua dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Wajib Belajar*. Lap. Penelitian. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Ulfatin, N. 2005. *Mengembangkan Life Skills di Sekolah Menengah dan Tinggi*. Makalah Seminar Kolegial. Malang: FIM UM.
- Ulfatin, N., Mukhadis, A. dan Imron, A. 2009. *Profil Wajib Belajar 9 Tahun dan Model Strategi Penuntasannya pada Daerah Rawan Drop Out dan Tidak Melanjutkan ke Sekolah Lanjutan di Kabupaten Kediri*. Laporan Penelitian. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.
- Ulfatin, N., Mukhadis, A. dan Imron, A. 2010. *Profil Wajib Belajar 9 Tahun dan Alternatif Penuntasannya*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 17, No.1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Zinser, R. 2012. *A Curriculum Model of a Foundation for Educating the Global Citizens of the Future*. *Horizon*. Vol.20. 64-73.